

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah kemiskinan dan kesenjangan di Indonesia bukan merupakan masalah baru. Bahkan kedua masalah tersebut telah menjadi topik pembicaraan dan fokus kebijakan pemerintah kolonial Belanda. Sesudah Indonesia merdeka, kedua masalah itu tetap menjadi perhatian pemerintah Indonesia. Meskipun kedua masalah itu telah lama ada di tengah-tengah bangsa Indonesia dan telah lama pula diupayakan untuk dihapuskan, namun kemiskinan dan kesenjangan itu tetap ada hidup bersama bangsa ini (Loekman Soetrisno dalam Dewanta, dkk, 1995 : 16).

Kesenjangan yang terjadi antar lapisan penduduk dalam suatu masyarakat pada hakekatnya bersumber dari masalah kemiskinan yang dialami oleh masyarakat yang bersangkutan. Untuk itu upaya mengurangi tingkat kesenjangan masyarakat dapat dilepaskan dari upaya menanggulangi atau memerangi masalah kemiskinan itu sendiri. Politik pembangunan ekonomi yang dicanangkan oleh Orde Baru berupa *economic growth development* meskipun sempat menggoreskan prestasi, akan tetapi ternyata belum dapat menuntaskan masalah kemiskinan. Di sisi lain proses pembangunan yang dilaksanakan bahkan mempunyai efek negatif berupa

Secara nasional jumlah kemiskinan absolut di Indonesia mengalami penurunan yang sangat tajam mulai tahun 1970 sampai dua dasawarsa. Jika pada tahun 1970, terdapat 70 juta atau 60 % penduduk Indonesia terhimpit kemiskinan, maka hanya dalam dua dasawarsa jumlah tersebut telah menjadi 27,7 juta atau 15,08 % saja dari populasi keseluruhan. Pada tahun 1993, jumlah penduduk yang masih berada di garis kemiskinan menjadi 25,9 juta atau 13,67 %. Jumlah penduduk miskin pada periode 1996 – 2005 berfluktuasi dari tahun ke tahun meskipun terlihat adanya kecenderungan menurun pada periode 2000 – 2005. Untuk lebih jelas mengenai jumlah penduduk miskin dari tahun 1996 – 2005 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel I.1

Jumlah dan persentase penduduk miskin di Indonesia tahun 1996-2005.

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Juta)					
	Kota	%	Desa	%	Kota dan Desa	%
1996	9,42	13,39	24,59	19,78	34,01	17,47
1998	17,60	21,92	31,90	25,72	49,50	24,23
1999	15,64	19,41	32,33	26,03	47,97	23,43
2000	12,30	14,60	26,40	22,38	38,70	19,14
2001	8,60	9,76	29,30	24,84	37,90	18,41
2002	13,30	14,46	25,10	21,10	38,40	18,20
2003	12,20	13,57	25,10	20,23	37,30	17,42
2004	11,40	12,13	24,80	20,11	36,10	16,66
2005	12,40	11,37	22,70	19,51	35,10	15,97

Sumber : Data BPS Tahun 2006.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pada periode 1996 – 1999 jumlah penduduk miskin meningkat sebesar 13,96 juta yang disebabkan karena terjadinya krisis ekonomi yang melanda Indonesia, yaitu dari 34,01 juta pada tahun 1996 menjadi 47,97 juta pada tahun 1999. Pada periode 1999

– 2002 terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 9,57 juta, yaitu dari 47,97 juta pada tahun 1999 menjadi 38,40 juta pada tahun 2002. Penurunan jumlah penduduk miskin juga terjadi pada periode 2002 – 2005. Namun demikian jumlah penduduk miskin di Indonesia mengalami peningkatan pada bulan Maret 2006, yaitu sebesar 3,95 juta. Pada tahun 2005 jumlah penduduk miskin sebanyak 35,10 juta (15,97 %) meningkat menjadi 39,05 juta (17,75 %) pada bulan Maret 2006. Hal tersebut dikarenakan adanya peningkatan pengeluaran yang cukup besar sebagai akibat dari naiknya harga BBM (www.bps.go.id).

Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan berbagai macam kebijakan untuk menanggulangi kemiskinan. Upaya-upaya pemerintah untuk mengurangi kemiskinan memang secara kuantitatif telah membuahkan hasil, namun demikian dari segi kualitatif perlu ditinjau lebih mendalam. Hal tersebut dikarenakan kebijakan pemerintah tersebut tidak secara langsung menyerang kepada penyebab kemiskinan yang paling mendasar. Adapun penyebab kemiskinan itu antara lain :

1. Kesempatan kerja. Seseorang itu miskin karena menganggur, sehingga tidak memperoleh penghasilan.
2. Upah gaji di bawah standar minimum. Seseorang bisa memiliki pekerjaan tertentu, tetapi jika upahnya di bawah standar, sementara pengeluarannya cukup tinggi, maka orang tersebut juga tergolong miskin.
3. Produktivitas kerja yang rendah. Pada umumnya kemiskinan yang disebabkan oleh hal ini terjadi pada sektor pertanian

4. Ketiadaan aset. Di bidang pertanian, kemiskinan terjadi karena petani tidak memiliki lahan atau kesempatan untuk mengolah lahan.
5. Diskriminasi. Kemiskinan bisa juga terjadi karena diskriminasi jenis kelamin.
6. Tekanan harga. Tekanan harga bukan hanya disebabkan karena mekanisme permintaan dan penawaran bebas, tetapi juga ditetapkan oleh pembeli, penimbunan, aturan tata niaga dan berbagai bentuk manipulasi. Akibatnya bisa beruntun, penerimaan yang rendah, kerugian, terjerat hutang dan bahkan juga penghentian produksi.
7. Penjualan tanah. Penjualan tanah bisa menimbulkan kejatuhan dan akhirnya kemiskinan. (Dawam Rahardja dalam Dewanta, dkk, 1995 : 145).

Dari beberapa jenis penyebab kemiskinan itu dapat dilihat arah dari upaya-upaya pengentasan masyarakat dari kemiskinan, misalnya dengan penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas kerja dan menyediakan aset untuk kegiatan produksi.

Namun demikian pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan sebagai upaya untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan belum melihat akan hal tersebut. Selama pemerintahan Orde Baru telah ada beberapa program yang dicanangkan dalam rangka menanggulangi kemiskinan penduduk. Program-program tersebut terkait dengan pelaksanaan pembangunan jangka panjang tahap I. Program-program pemerintah dalam rangka menanggulangi kemiskinan tersebut antara lain Inpres Desa Tertinggal (IDT), Tabungan

Kesejahteraan Keluarga (Takesra) dan Kredit Usaha Kesejahteraan Keluarga (Kukesra).

Orientasi sasaran IDT, Takesra dan Kukesra adalah masyarakat miskin di Indonesia. Meskipun sasaran program sama, yaitu penduduk miskin akan tetapi jika dilihat secara lebih khusus terdapat perbedaan wilayah sasaran antara IDT, Takesra dan Kukesra. IDT memiliki sasaran penduduk miskin yang berada di luar lokasi desa tertinggal. Adapun sasaran tersebut telah dibatasi yaitu keluarga yang termasuk dalam kategori keluarga pra sejahtera (KP) dan keluarga sejahtera I (KS-I) yang didasarkan pada data hasil survey yang dilakukan oleh Badan Kesejahteraan Keluarga Berencana Negara (BKKBN) (Ambar Teguh S, 2004 : 8).

Namun demikian walaupun telah banyak program pemerintah yang dicanangkan untuk memberantas kemiskinan, tetapi tetap saja masih banyak masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan. Apalagi setelah pemerintahan SBY-JK yang telah membuat kebijakan untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Dengan adanya kenaikan harga bahan bakar minyak tersebut telah membawa dampak pada semakin membengkaknya jumlah orang miskin di negara ini. Jumlah orang miskin meningkat lebih dari 10 % dari sebelumnya 24 juta jiwa. Sekarang jumlah orang miskin mencapai 46 juta jiwa. Hal tersebut disebabkan karena harga-harga kebutuhan pokok di pasaran mengalami kenaikan yang tidak diimbangi oleh pendapatan yang diperoleh masyarakat. Di tengah kemiskinan yang membengkak tersebut, pemerintah kemudian berinisiatif untuk memberikan kompensasi kenaikan

BBM kepada masyarakat yang dianggap memenuhi syarat kemiskinan sebesar Rp. 300.000 selama tiga bulan yang disebut dengan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) (Kedaulatan Rakyat, 25 Oktober 2005).

Munculnya program Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) bagi masyarakat miskin banyak menuai pro dan kontra. Menurut Dedi Muhtadi, Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) tidak melewati prosedur yang baku. Setidaknya ada 4 (empat) prosedur yang harus dilewati antara lain :

1. Sensus kemiskinan yang harus akurat dan saksama. Tentu saja ini butuh waktu yang panjang karena data ini akan menjadi acuan utama program.
2. Uji coba dalam skala kecil yang bertujuan menguji kelayakan program dari aspek sosial, ekonomi dan politik. Termasuk juga untuk melihat sejauhmana desain sistem operasional, mekanisme penyaluran dan kelembagaan bisa berjalan.
3. Membuat sistem monitoring dan evaluasi yang terintegrasi dalam kelembagaan pelaksana program. Selama ini tidak jelas siapa yang melakukan monitoring dan evaluasi.
4. Sistem monitoring dan evaluasi dari lembaga independen yang seharusnya juga menverifikasi program ini lembaga luar akan lebih independen dengan

Dengan tidak adanya prosedur baku tersebut di atas, maka pemberian dana Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) dapat disalahgunakan oleh masyarakat yang menerimanya. Dana tersebut tidak digunakan untuk pemenuhan kebutuhan pokok, tetapi dapat juga untuk membayar hutang, berjudi dan bahkan ada yang untuk membeli minuman keras. Kondisi tersebut menyebabkan misi program tersebut untuk mensejahterakan rakyat tidak akan tercapai.

Selain belum adanya prosedur baku, Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) juga mengalami kekisruhan dalam hal pelaksanaannya. Banyak Kartu Kompensasi BBM (KKB) yang salah sasaran, sehingga terdapat kartu yang tidak didistribusikan dan ditarik kembali dari penerima yang tidak layak mendapatkannya. Hal tersebut disebabkan karena adanya kesalahan dalam mendata keluarga miskin. Petugas pencacah lapangan yang telah mendapatkan tugas dari BPS tidak mendatangi rumah keluarga yang diusulkan untuk mendapatkan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM). Selain itu, sebagian petugas lebih mengutamakan keluarga mereka, meskipun tidak layak untuk mendapatkan dana PKPS-BBM tersebut. Peran Ketua RT untuk mendapatkan data penerima dana PKPS-BBM seringkali tidak diindahkan, sehingga sering terjadi kekeliruan dalam pendataan keluarga miskin yang layak mendapatkan dana tersebut (Kompas, 22 Oktober 2005).

Anggaran PKPS-BBM untuk tiga bulan terhitung 1 Oktober 2005 hingga 31 Desember 2005 adalah Rp. 4.647.714.300.000. Penerimaannya

menggunakan pos dana cadangan (*policy measures*) Rp. 5 triliun dalam APBN 2005. Penyaluran dana PKPS-BBM tersebut melalui PT. Pos karena dianggap efisien dan terjamin keamanannya. Dengan pemberian dana kompensasi tersebut pemerintah berasumsi masyarakat miskin akan dapat bertahan hidup sekalipun harga BBM naik sampai 87 %. Padahal dana Rp. 300.000 per tiga bulan sama sekali tidak mendongkrak kehidupan mereka yang miskin. Sehingga pemberian kompensasi belum dapat dikatakan untuk mensejahterakan rakyat miskin, karena program pemberian dana kompensasi BBM tidak jelas arahnya. Dana tersebut merupakan *entry point* untuk kesejahteraan atau hanya sekedar dana kompensasi. Jika misinya untuk kesejahteraan rakyat jelas besaran dana yang diberikan tidak akan mampu memutus rantai kemiskinan (Kedaulatan Rakyat, 25 Oktober 2005).

Kebijakan PKPS-BBM terkesan terburu-buru, karena hanya berselang 21 hari dari keluarnya instruksi presiden mengenai pelaksanaan PKPS-BBM. Tidak mengherankan jika kemudian timbul banyak masalah, antara lain :

- a. Lemahnya sosialisasi. Belum adanya kesamaan pemahaman antara berbagai instansi pemerintah, media maupun masyarakat. Hal itu terlihat dari penggunaan istilah yang berbeda-beda. Ada yang menyebutnya Program Kompensasi Pengurangan Subsidi (PKPS), Dana Kompensasi BBM (DKB) atau Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM). Hal ini membuktikan masih lemahnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah tentang program ini

B. Rumusan Masalah

Dalam mengadakan suatu penelitian perlu dirumuskan masalahnya terlebih dahulu sehingga dalam penelitian nanti dapat menjurus kepada objek yang telah ditentukan. Hal ini penting karena masalah adalah setiap kesulitan yang menggerakkan manusia untuk menyelesaikan masalahnya. Menurut Soerjono Soekanto (1990 : 109), “masalah ini merupakan suatu proses yang mengalami halangan di dalam mencapai tujuannya”.

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah, maka peneliti dapat merumuskan suatu permasalahan sebagaimana berikut :

“Bagaimana Implementasi Kebijakan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) di Desa Saketi, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang ?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui gambaran pelaksanaan kebijakan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) yang diberikan

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademik.

Menerapkan dan mengembangkan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan dalam kehidupan masyarakat.

b. Manfaat Praktis.

Melalui penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah maupun lembaga yang terkait dalam upaya untuk mengurangi kemiskinan melalui kebijakan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM).

D. Kerangka Dasar Teori

Teori merupakan pernyataan mengenai sebab akibat atau mengenai adanya situasi hubungan positif antara gejala yang diteliti dan satu atau beberapa faktor tertentu dalam masyarakat. Teori merupakan informasi ilmiah yang diperoleh dengan meningkatkan abstraksi-abstraksi pengertian maupun hubungan-hubungan dalam proposisi (Masri Singarimbun, 1995:19).

Sedangkan menurut Snelbecker dalam Lexy J. Moleong (2000 : 34) teori adalah “seperangkat proposisi yang terintegrasi secara sintaksis (yaitu yang mengikuti aturan tertentu yang dihubungkan dengan lainnya) dengan data dasar yang dapat diambil dengan berfungsi sebagai wahana untuk *memeramkan dan menielakan fenomena yang diamati*”

Berdasarkan pengertian di atas dapat dikatakan bahwa kerangka dasar teori atau kerangka teori digunakan untuk membantu memastikan hal-hal yang meragukan dalam pelaksanaan suatu penelitian, sehingga dengan adanya kerangka teori penelitian diharapkan penelitian ini dapat berjalan sesuai dengan rencana dan tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami dan mengartikan konsep-konsep yang berhubungan dengan penelitian. Kerangka teori akan digunakan sebagai sumber dalam memecahkan masalah. Inti dari teori-teori yang ada dimaksudkan sebagai dasar atau landasan bagi penyusun untuk mengemukakan pendapat secara sistematis. Sebelum penelitian dilakukan, penyusun terlebih dahulu menjelaskan teori-teori sebagai berikut :

1. Implementasi Kebijakan Program PKPS-BBM melalui Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM)

a. Kebijakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Poerwadarminta, 1989 : 356), kebijakan mempunyai arti “serangkaian konsep yang menjadi garis besar dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan kepemimpinan dan cara bertindak”. Sedangkan menurut Amara Raksataya dalam Mas Roro Lilik Ekowati (2005 : 6), kebijakan adalah sebagai suatu taktik atau strategi yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu, sehingga suatu kebijaksanaan memuat tiga elemen, yaitu :

- 1) Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai

- 2) Taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
- 3) Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi yang ditetapkan.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa sebuah kebijakan merupakan produk dari sebuah keputusan. Untuk melaksanakannya, dan dengan harapan dapat tercapai tujuan dari kebijakan tersebut, maka perlu kiranya kebijaksanaan itu harus diterjemahkan dalam bentuk yang lebih konkret.

Menurut Edi Suharto (2005 : 7), “kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan”. Sedangkan menurut Ealau dan Prewitt dalam Edi Suharto (2005 : 7), “kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang mentaatinya”. Titmuss dalam Edi Suharto (2005 : 7) mendefinisikan “kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan yang diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu”. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.

Definisi kebijakan mempunyai beberapa implikasi yaitu

- 1) Bahwa kebijaksanaan negara itu dalam bentuk perdananya berupa penetapan tindakan-tindakan dari pemerintah.
- 2) Bahwa kebijaksanaan negara itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan dalam bentuk yang nyata.
- 3) Bahwa kebijaksanaan negara itu, baik untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, mempunyai dan dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu.
- 4) Bahwa kebijaksanaan itu harus senantiasa ditujukan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat.

Kebijakan yang dibuat pemerintah kemudian dituangkan dalam tindakan-tindakan nyata yang mempunyai tujuan antara lain :

- 1) Untuk menjamin kepentingan umum semaksimal mungkin.
- 2) Ditetapkan berdasarkan prosedur yang berlaku.
- 3) Didorong oleh keinginan untuk menghindari pertentangan yang destruktif (Mas Roro Lilik Ekowati, 2005 : 6).

Dengan demikian kebijakan yang telah diputuskan akan selalu menuntut suatu pemahaman tentang isi dari kebijakan yang bersangkutan, sehingga tujuan dari kebijakan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan maksimal.

b. Implementasi Kebijakan

Menurut Abdul Wahab Solikhin (1990 : 5) suatu proses implementasi kebijakan merupakan keseluruhan dari kegiatan atau

tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok pemerintah dan swasta yang diarahkan pada pencapaian-pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam pengambilan keputusan kebijakan.

Implementasi merupakan proses kegiatan yang acapkali rumit, diwarnai oleh pembentukan kepentingan antar aktor yang terlibat. Implementasi bukanlah proses mekanisme dimana setiap aktor secara otomatis melakukan apa saja yang telah diinformasikan dalam kebijakan. Akan tetapi banyak sekali kebijakan yang didasarkan pada ide-ide yang kelihatannya sangat layak akan ternyata memenuhi keulitan ketika dipraktekkan di lapangan. Selama proses implementasi beragam asumsi dan interpretasi tujuan dapat berkembang.

Kebijakan yang telah direkomendasikan untuk dipilih oleh *policy makers* bukanlah jaminan bahwa kebijakan tersebut pasti berhasil dalam implementasinya. Implementasi dari suatu program melibatkan upaya-upaya *policy makers* untuk mempengaruhi perilaku birokrat pelaksana agar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok sasaran. Untuk kebijakan yang sederhana, implementasi hanya melibatkan satu badan yang berfungsi sebagai implementor (pelaksana). Sebaliknya untuk kebijakan makro, misalnya kebijakan pengurangan kemiskinan di pedesaan, maka usaha-usaha implementasi akan melibatkan berbagai institusi seperti birokrasi kabupaten, kecamatan, pemerintah desa (AG Subarsana, 2005 : 88)

Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan menurut Merilee S. Grindle dalam AG. Subarsono (2005 : 93), keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh 2 (dua) variabel besar, yaitu :

1) Isi kebijakan yang mencakup :

- a) Sejauhmana kepentingan kelompok sasaran atau *target groups* termuat dalam isi kebijakan.
- b) Jenis manfaat yang diterima oleh *target groups*.
- c) Sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan suatu program yang bertujuan mengubah sikap dan perilaku kelompok sasaran relatif lebih sulit diimplementasikan daripada program yang sekedar memberikan bantuan kredit atau bantuan beras kepada kelompok masyarakat miskin.
- d) Apakah letak sebuah program sudah tepat.
- e) Apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci.
- f) Apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai.

2) Lingkungan kebijakan :

- a) Seberapa besar kekuasaan, kepentingan dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan.
- b) Karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa

c) **Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.**

Dalam rangka implementasi kebijakan, pelaksana harus tunduk kepada instruksi-instruksi legal dan petunjuk-petunjuk tertentu yang dibuat oleh pembuat kebijakan. Pelaksana harus mengetahui atau memahami apa yang harus mereka lakukan, karena pemahaman terhadap suatu kebijakan adalah hal penting dalam proses implementasi disamping pengorganisasian dan pengaplikasian kebijakan.

Untuk menganalisis proses implementasi maka diperlukan adanya pendekatan yaitu :

a. **Pendekatan Struktural**

Perubahan yang dilaksanakan dalam implementasi biasanya ditimbulkan dari dalam organisasi atau sepenuhnya berada di bawah kendali organisasi, baik arah, laju maupun waktu implementasi dipandang sebagai teknis atau manajerial. Rancang bangun kebijaksanaan dan rancang bangun organisasi sedapat mungkin seyogyanya dipertimbangkan secara bersamaan. Struktur yang bersifat organis cocok untuk situasi implementasi dimana diperlukan rancang bangun yang mampu melaksanakan yang serancang bangun suatu struktur khusus untuk program yang sekali

b. Pendekatan Prosedural dan Managerial

Bahwa perilaku mencakup beberapa prosedur-prosedur yang diantaranya menyangkut penjadwalan, perencanaan dan pengawasan. Di dalam implementasi adanya tingkat kemampuan pengawasan yang tinggi atas pelaksanaan dan hasil akhir suatu program yang dianggap terisolasi dari pengaruh lingkungan. Perencanaan dan pengawasan menyajikan suatu kerangka kerja dimana proyek dapat dilaksanakan dan implementasinya dapat diawasi dengan cara mengidentifikasi tugas yang harus diselesaikan.

c. Pendekatan Perilaku

Perilaku manusia beserta segala sikap harus dipengaruhi kebijakan ingin cepat diimplementasikan dengan baik. Pendekatan keperilakuan diawali dengan suatu keadaan bahwa sering terjadi biasanya adalah alternatif-alternatif yang tersedia jarang sekali yang sederhana seperti menerima untuk menolak terhadap perubahan implementasi kebijaksanaan.

c. Kebijakan Pengentasan Kemiskinan

Menurut Mubyarto (1995 : 159-160), kebijakan penanggulangan kemiskinan meskipun dirancang secara eksplisit namun telah menjadi bagian dari program-program sektoral seperti pertanian, perindustrian, transmigrasi, koperasi, Keluarga Berencana

pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial. Mulai Repelita VI pemerintah meluncurkan program khusus, yaitu program Inpres Desa Tertinggal (IDT). Inpres ini yaitu Inpres No. 5/1993 tentang peningkatan penanggulangan kemiskinan yang dimaksudkan untuk meningkatkan penanganan masalah kemiskinan secara berkelanjutan di desa-desa miskin.

Program IDT pada hakekatnya merupakan bagian penting dari gerakan nasional untuk menanggulangi kemiskinan sekaligus sebagai bagian dari strategi mengembangkan ekonomi rakyat. Melalui program IDT diharapkan terjadi proses pemberdayaan masyarakat, serta perubahan struktur sosial yang kondusif bagi peningkatan kapasitas masyarakat. Proses pemberdayaan masyarakat dan perubahan struktur sosial tersebut terutama dilakukan melalui : peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan permodalan, pengembangan peluang kerja dan berusaha, serta penguatan kelembagaan kelompok miskin.

Untuk memacu program IDT, pemerintah memberi bantuan dana sebesar Rp. 20 juta per desa, disalurkan langsung kepada kelompok masyarakat (pokmas) yang tergolong miskin. Dana tersebut disalurkan langsung kepada kelompok miskin melalui bank penyalur di tingkat kecamatan dan dicairkan berdasarkan Daftar Isian Kegiatan Kelompok (DIKK) dan Daftar Usulan Kegiatan (DUK) yang dibuat bersama oleh kelompok miskin dalam musyawarah kelompok

disetujui dalam forum diskusi UDKP dan diketahui oleh Kepala Desa. Dalam tahun anggaran 1994/1995, jumlah desa di seluruh Indonesia yang memperoleh alokasi dana sebanyak 20.633 desa. Jumlah itu dalam tahun anggaran 1995/1996 naik menjadi 22.904 desa.

Dana program IDT adalah modal usaha yang dapat dimanfaatkan oleh kelompok miskin untuk kegiatan sosial-ekonomi yang bersifat produktif. Pemanfaatannya disesuaikan dengan kemampuan, pengetahuan dan kemauan kelompok miskin sendiri. Dana tersebut digulirkan sebagai modal usaha yang diharapkan dapat dimanfaatkan oleh segenap anggota masyarakat yang tergolong miskin secara bergiliran. Hal ini berarti, bagi anggota kelompok masyarakat, dana program IDT tersebut merupakan pinjaman yang harus dikembalikan kepada kelompok. Dana tersebut dapat dipinjam kembali oleh anggota lain dalam satu kelompok, atau oleh kelompok lain yang belum memperoleh bantuan dana program IDT.

Dalam kenyataannya, implementasi program IDT sangat kompleks. Benar bahwa kondisi sejumlah desa tertinggal semakin berkembang dan kelompok miskin dapat meningkatkan pendapatannya setelah menjadi bagian dari program IDT. Namun demikian, sebenarnya tidak sedikit diantara desa tertinggal lainnya yang hampir tidak berkembang. Jumlah dana yang tersalur di desa-desa tersebut tidak sesuai dengan ketentuan, pemanfaatannya tidak mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan dan pembinaannya pun tidak sesuai

dengan yang diharapkan. Oleh karena itu program IDT merupakan salah satu program, bukan satu-satunya program untuk menanggulangi kemiskinan (Sunyoto Usman, 2004 : 50-52).

Pada tahun 2005 pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan untuk mengatasi meningkatnya jumlah masyarakat miskin karena adanya kenaikan harga BBM yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat miskin. Kebijakan tersebut berupa Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) yang merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kepada rumah tangga miskin sebagai kompensasi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Dana PKPS-BBM tersebut sebesar Rp. 300.000 yang diberikan kepada masyarakat miskin setiap tiga bulan sekali. Program ini diselenggarakan berdasarkan Inpres No. 12 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Kepada Rumah Tangga Miskin yang dikeluarkan dan berlaku mulai 10 September 2005.

Dalam pelaksanaan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM), BPS telah menetapkan 14 (empat belas) kriteria keluarga miskin, seperti yang telah disosialisasikan oleh Departemen Komunikasi dan Informatika bahwa ciri rumah tangga miskin, yaitu :

- a. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m² per orang.
- b. Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan

- c. Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa plester.
- d. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain.
- e. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
- f. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan.
- g. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah.
- h. Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu.
- i. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.
- j. Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam seminggu.
- k. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik.
- l. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah : petani dengan luas lahan 0,5 ha, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp. 600.000 per bulan.
- m. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga : tidak sekolah/tidak

n. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai Rp. 500.000, seperti : sepeda motor (kredit/non kredit), emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

(www.kompensasibbm.com).

Setelah data itu direalisasikan dalam pelaksanaan PKPS-BBM ternyata masih terdapat kelemahan dan kekurangan. Salah satunya adalah yang terjadi di Yogyakarta yaitu sebanyak 50.000 keluarga miskin belum memperoleh Kartu Kompensasi BBM.

Dari pengalaman pelaksanaan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM), tampaknya sudah sangat mendesak bagi pemerintah untuk melakukan sensus ekonomi dan sosial terhadap seluruh rakyat Indonesia. Seandainya pemerintah berniat melanjutkan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM), maka hasil sensus tersebut dapat digunakan sebagai landasan yang akurat untuk menentukan sasaran Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM). Disamping itu pemerintah juga mengambil langkah-langkah yang lebih efisien, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga tidak memicu terjadinya konflik sosial di dalam masyarakat.

2. Konsep Kemiskinan

a. Dimensi Kemiskinan

Kemiskinan berkaitan erat dengan kualitas sumber daya manusia, kemiskinan muncul karena sumber daya manusia tidak berkualitas, demikian pula sebaliknya. Meningkatkan sumber daya manusia mengandung upaya menghapuskan kemiskinan. Tidak mudah untuk membangun pengertian kemiskinan karena menyangkut berbagai macam dimensi. Dimensi kemiskinan dapat diidentifikasi menurut ekonomi, sosial dan politik. Atas dasar itu kemudian dapat dirancang upaya untuk memerangi kemiskinan. Lebih lanjut dimensi kemiskinan menurut Ellis dalam Tadjudin (1995 : 249-253) adalah sebagai berikut :

1) Kemiskinan ekonomi

Secara ekonomi, kemiskinan dapat diartikan sebagai kekurangan sumber daya yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang. Sumber daya yang dimaksud dalam pengertian ini mencakup konsep ekonomi yang luas tidak hanya pengertian finansial, tetapi perlu mempertimbangkan semua jenis kekayaan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari pengertian sumber daya itu kemudian dapat muncul berbagai kemiskinan. Kemiskinan yang dialami sekelompok orang dikaitkan dengan pendapatan dan kebutuhan. Dengan kebutuhan hanya mengacu pada kebutuhan

pokok atau kebutuhan dasar minimum untuk hidup layak. Bila pendapatan seseorang atau keluarga tidak memenuhi kebutuhan minimum, maka orang atau keluarga itu dapat dikategorikan miskin (kemiskinan absolut). Tingkat pendapatan atau kebutuhan minimum merupakan garis batas antara miskin dan tidak miskin.

Tingkat pendapatan seseorang sangat mungkin telah mencapai tingkat kebutuhan dasar minimum (di atas garis kemiskinan absolut) tetapi bila dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat (pendidikan, kesehatan dan lain-lain) pada saat itu masih rendah atau di bawah kebutuhan fisik minimum, maka orang atau keluarga tersebut tergolong miskin. Jadi menurut konsep ini kemiskinan adalah keadaan tidak tercapainya kebutuhan dasar manusia sesuai dengan kebutuhan saat itu (kemiskinan relatif).

Berdasarkan kemiskinan relatif ini muncul kemiskinan sumber daya manusia. Kemiskinan sumber daya manusia merujuk pada kurangnya pendidikan dalam arti luas, termasuk kekurangan tenaga terampil terlatih, kemampuan manajerial, kemampuan wiraswasta dan kepemimpinan. Ukuran yang dipakai dalam menentukan kemiskinan ini adalah per kapita dari sumber daya yang tersedia.

2) Kemiskinan sosial

Kemiskinan sosial dapat diartikan sebagai kekurangan jaringan sosial dan struktur sosial yang mendukung untuk

mendapatkan kesempatan-kesempatan agar produktivitas seseorang meningkat. Dapat juga dikatakan bahwa kemiskinan sosial adalah kemiskinan yang disebabkan oleh adanya faktor-faktor penghambat sehingga mencegah dan menghalangi seseorang untuk memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang tersedia. Faktor-faktor penghambat tersebut dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

- a) Faktor yang datang dari luar kemampuan seseorang, misalnya birokrasi atau peraturan-peraturan resmi yang dapat mencegah seseorang memanfaatkan kesempatan yang ada. Dengan demikian kemiskinan muncul sebagai akibat dari adanya hambatan-hambatan struktural. Jadi kemiskinan ini bukan karena seseorang malas bekerja atau karena tidak mampu bekerja.
- b) Faktor yang datang dari dalam diri seseorang atau sekelompok orang, misalnya rendahnya tingkat pendidikan atau karena ada hambatan budaya. Kemiskinan dapat muncul sebagai akibat nilai-nilai dan kebudayaan yang dianut oleh sekelompok orang itu sendiri. Sekelompok orang tersebut tidak terintegrasi dengan masyarakat luas, apatis, cenderung menyerah pada nasib, tingkat pendidikan rendah, serta tidak mempunyai daya iwang dan kemampuan untuk memikirkan masa depan

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hal ihwal kemiskinan sekelompok orang lebih berkaitan dengan adanya hambatan struktural yang tidak memberikan peluang untuk memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang ada dalam perekonomian. Oleh karena itu kemiskinan di kalangan masyarakat miskin lebih disebabkan adanya himpitan struktural.

3) Kemiskinan politik

Kemiskinan politik menekankan pada derajat akses terhadap kekuatan (*power*). Kekuasaan yang dimaksud mencakup tatanan sistem sosial politik yang dapat menentukan alokasi sumber daya untuk kepentingan sekelompok orang atau tatanan sistem sosial politik yang menentukan alokasi penggunaan sumber daya. Cara mendapatkan akses itu dapat melalui sistem politik formal, kontak-kontak informal dengan struktur kekuasaan, dengan mempunyai pengaruh pada kekuasaan ekonomi. Namun aspek-aspek itu tidak begitu penting dalam menilai kemiskinan politik.

Hal yang perlu diperhatikan adalah :

- a) Bagaimana sekelompok orang dapat memanfaatkan sumber daya yang tersedia dalam masyarakat tersebut.
- b) Bagaimana sekelompok orang dapat turut dan ambil bagian dalam pengambilan keputusan penggunaan sumber daya yang

c) Kemampuan untuk turut serta dalam membentuk keleluasaan dalam masyarakat yang akan dilaksanakan dan ditaati oleh pemerintah.

Sekelompok orang atau seseorang dapat digolongkan sebagai kemiskinan politik apabila tiga hal tersebut tidak dimiliki oleh mereka.

Kemiskinan politik ini merupakan gejala yang secara tidak langsung dapat berpengaruh pada pengembangan kreativitas manusia dan masyarakat yang pada gilirannya berpengaruh pada kualitas manusia. Bila kemiskinan politik melanda suatu masyarakat ada kecenderungan masyarakat kurang dapat mengembangkan diri diikuti dengan munculnya sikap masa bodoh. Lambat laun tapi pasti hal itu dapat menurunkan kegairahan masyarakat untuk turut serta dan terlibat dalam proses pembangunan. Oleh karena itu, kemiskinan politik perlu diperangi agar masyarakat dapat mengembangkan diri sesuai dengan kodratnya sehingga kualitas sumber daya manusia dapat meningkat.

Berbagai uraian mengenai dimensi kemiskinan menjadi tolak ukur yang dapat digunakan agar dapat mengurangi dan menghapuskan kemiskinan itu sendiri. Tolak ukur ini memang berbeda-beda antara tolak ukur satu dengan yang lain. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tolak ukur kemiskinan lebih

bersifat relatif menyesuaikan dengan kondisi masyarakat. Tolak ukur yang telah diuraikan diatas lebih menitikberatkan pada peningkatan sumber daya manusia yang merupakan salah satu upaya untuk mengurangi kemiskinan agar tidak terjadi lagi kemiskinan ekonomi, sosial maupun politik dalam masyarakat.

b. Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan

Menurut Bambang Sudibyo dalam Dewanta, dkk (1999 : 12-13), mengatakan bahwa ada 3 (tiga) sebab kemiskinan, yaitu :

- 1) Kesenjangan fungsi produksi.
- 2) Keadilan distribusi nilai tambah di sektor modern pemasok, *labour, capital dan intelektual.*
- 3) Ketidakmerataan tingkat monetisasi di dalam masyarakat.

Dalam rangka memberikan solusi terhadap masalah kemiskinan absolut ini diperlukan data yang mampu mengantarkan pemahaman tentang besar kecilnya jumlah penduduk yang berada pada klasifikasi kemiskinan absolut.

c. Kriteria Penduduk Miskin

Indikator kemiskinan oleh sebagian ahli masih dipandang sebagai 'tidak mencerminkan kebutuhan manusia secara manusiawi'. Batas kemiskinan yang ditetapkan sebesar 2.100 kalori atau sekitar Rp. 100.000 per kapita per bulan untuk tahun

2003 (dibulatkan untuk wilayah perkotaan dan perdesaan), dipandang masih terlalu rendah. Pendapatan sebesar itu tentunya hanya 'cukup' untuk memenuhi kebutuhan 'sangat dasar'. Dengan batas kemiskinan yang rendah ini, sangat dimaklumi jika banyak penduduk yang sebenarnya masih dalam kategori miskin, terangkat menjadi kelompok 'tidak miskin' atau 'agak miskin'. Sebagai perbandingan, Bank Dunia menetapkan garis kemiskinan sebesar \$US 2 per kapita per hari. Jika kurs rupiah terhadap dollar Amerika saat ini dihitung sebesar Rp. 9.000,-, maka garis kemiskinan per orang per bulan adalah sebesar Rp. 540.000,-. Jika garis kemiskinan ini yang dipergunakan, maka tentunya jumlah penduduk miskin di Indonesia diperkirakan bisa mencapai lebih dari 60 % dari total penduduk saat ini (Edi Suharto, 2005 : 19).

Sedangkan menurut Sutyastie Soemitro (2002 : 15) kriteria ekonomi penduduk miskin adalah sebagai berikut :

1) Pekerjaan kepala rumah tangga

Pekerjaan kepala rumah tangga terbagi menjadi dua jenis yaitu karyawan/buruh dan pengusaha/majikan. Pekerjaan dengan status karyawan/buruh merupakan kepala rumah tangga yang memperoleh gaji atau upah sebagai imbalan (balas jasa) dari pekerjaannya. Sebaliknya, pekerjaan dengan status pengusaha/majikan adalah kepala rumah tangga yang memiliki

usaha atau pemegang saham yang memperoleh pendapatan, keuntungan atau bagian keuntungan dari aktivitas usaha.

Di wilayah perkotaan, jumlah kepala rumah tangga miskin yang menjadi pengusaha hampir sama dengan mereka yang bekerja sebagai buruh. Sedangkan di wilayah pedesaan lebih banyak pengusaha ketimbang buruh. Meskipun demikian, kepala rumah tangga miskin di wilayah pedesaan termasuk golongan ekonomi lemah dan merupakan citra yang jauh dari konglomerat.

2) Pola konsumsi rumah tangga

Secara umum porsi konsumsi makanan dari rumah tangga miskin sampai sebesar 70,6 % dibandingkan dengan porsi konsumsi bukan makanan yang hanya 29,31 %. Kondisi ini terjadi karena rumah tangga miskin masih menganggap kebutuhan makanan sebagai kebutuhan utama mereka dibandingkan dengan kebutuhan sekunder yang lain. Dibandingkan dengan kondisi perkotaan, porsi konsumsi makanan rumah tangga miskin lebih besar di wilayah pedesaan. Kemiskinan di wilayah pedesaan sudah demikian buruknya dimana keluarga miskin harus mengkonsumsi porsi yang besar dari pendapatannya untuk makanan

3) Karakteristik sosial budaya

Tingkat pendidikan rumah tangga miskin ternyata jauh lebih rendah dari rumah tangga bukan miskin. Hanya 6,8 % dari anggota rumah tangga miskin berpendidikan sekurang-kurangnya pada sekolah tingkat kedua (SLTP), di pihak lain terdapat 18,6 % dari anggota rumah tangga yang bukan miskin. Selain itu, lebih dari 70 % anggota rumah tangga miskin tidak memasuki sekolah dan/atau tidak tamat sama sekali dari sekolah dasar, sedangkan rumah tangga bukan miskin hanya 55,5 %. Rata-rata orang miskin di wilayah perkotaan berpendidikan lebih tinggi daripada di wilayah pedesaan.

Mengenai jumlah dan lokasi orang miskin pada saat ini, pemerintah Indonesia menyadari bahwa kebijaksanaan dan program penanggulangan kemiskinan tidak dapat sama sekali tergantung kepada kebijaksanaan ekonomi makro saja. Kebijaksanaan ekonomi mikro atau bahkan kebijaksanaan ekonomi sosial harus dilakukan bersama-sama dengan kebijaksanaan ekonomi makro untuk menanggulangi kemiskinan.

E. Definisi Konseptual

Menurut Masri Singarimbun (1995 : 17), konsep adalah “unsur penelitian yang terpenting dan merupakan definisi yang dipakai oleh para

... .. ketek. suatu fenomena sosial ataupun

fenomena alami". Dengan demikian dapat dikatakan bahwa konsep unsur yang terpenting ada dalam penelitian ilmiah. Adapun konsep dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Implementasi Kebijakan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM)

Adalah penerapan/pelaksanaan suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai pemberian dana bantuan kepada rumah tangga miskin sebagai kompensasi kenaikan harga BBM berupa pemberian uang senilai Rp. 300.000 per tiga bulan.

2. Kemiskinan

Adalah suatu kondisi masyarakat atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi, sosial maupun politik untuk mengakses sumber-sumber pemenuhan kebutuhan.

F. Definisi Operasional

Menurut Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi (1995 : 29), "definisi operasional adalah salah satu unsur yang sangat membantu komunikasi antara peneliti yang menciptakan petunjuk bagaimana suatu variabel dapat diukur dengan membaca definisi dalam suatu penelitian. Dengan mengetahui pengukuran suatu variabel, maka dapat diketahui baik dan buruknya suatu pengukuran tersebut". Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Implementasi kebijakan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) :

- a. Pemahaman masyarakat penerima dana Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) mengenai kriteria penduduk miskin.
- b. Prosedur pembagian dana Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM).
- c. Intensitas mendapatkan dana Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM).
- d. Manfaat Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) bagi masyarakat.
- e. Kendala yang terjadi pada saat pembagian dana Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM).

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian.

Dalam pelaksanaan penelitian ini, penyusun menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Sumadi Suryabrata (1988 : 140), mengemukakan bahwa “tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat perencanaan secara sistematis, faktual dan aktual mengenai fakta-fakta dan populasi daerah tertentu”.

penelitian ditentukan terlebih dahulu oleh penyusun sendiri. Dalam purposive sampling, sampel dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu, pertimbangan tersebut yaitu masyarakat yang menerima dana PKPS-BBM sehingga penentuan sampel sesuai dengan judul skripsi ini. Besarnya sampel dalam penelitian ini, yaitu masyarakat penerima dana Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) di Desa Saketi, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, Propinsi Banten adalah 20 orang responden yang diharapkan mampu mewakili populasi. Penyusun menentukan jumlah responden dengan pertimbangan bahwa jumlah penduduk miskin yang menerima atau populasi hanya sebesar 159 orang atau 60 % dari jumlah penduduk miskin di Desa Saketi yaitu 266 orang. Oleh karena keterbatasan tenaga, waktu dan biaya dalam pengumpulan data tersebut maka penyusun hanya mengambil 12,5 % dari jumlah populasi yang ada.

4. Teknik Pengumpulan Data.

a. Observasi.

Observasi adalah kegiatan pengamatan terhadap objek yang akan diteliti dengan terjun langsung kepada objek penelitian. Observasi ini dilakukan dan dijalankan untuk menentukan data-data yang berhubungan dengan masalah, cara kerja, bentuk dan teknik aparatur pemerintah desa dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Sebagai metode ilmiah observasi adalah pengamatan dan pencatatan

Menurut Ronny Kountur (2003 : 105), “penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap objek yang diteliti”. Penelitian deksriptif itu sendiri mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

1. Berhubungan dengan kejadian yang terjadi pada saat itu.
2. Mengurai satu variabel saja atau beberapa variabel namun diuraikan satu persatu.
3. Variabel yang diteliti tidak dimanipulasi atau tidak ada perlakuan (*reatment*).

Oleh karena itu penelitian ini hanya berusaha untuk memfokuskan pada penggambaran dan pemecahan masalah yang dianalisis secara kualitatif.

2. Unit Analisis.

Dalam penelitian ini unit analisisnya adalah masyarakat di Desa Saketi, Kecamatan saketi, Kabupaten Pandeglang, Propinsi Banten yang menerima dana Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM).

3. Informan/Responden.

Sampel adalah sebagian dari populasi yang diselidiki. Dalam penelitian ini untuk menentukan besarnya jumlah sampel yang akan diambil menggunakan *Purposive Sampling* (sampel bertujuan). Hal ini dilakukan oleh peneliti dengan pertimbangan bahwa sampel dalam

dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki (Sutrisno Hadi, 1989 : 136). Observasi ini dilakukan oleh penyusun untuk mengamati penerimaan dana PKPS-BBM di Desa Saketi dan penggunaan dana tersebut oleh masyarakat.

b. Interview.

Adalah suatu proses tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik yang satu dapat melihat muka orang yang lain dan mendengarkan dengan telinga suaranya (Sutrisno Hadi, 1989 : 192). Kegunaannya yaitu untuk mengumpulkan data primer yang langsung dari responden. Jadi teknik interview ini merupakan salah satu cara pengumpulan data dengan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden yang menjadi objek penelitian.

c. Dokumentasi.

Metode ini digunakan untuk mendapatkan data sekunder yaitu dengan cara-cara mempelajari arsip-arsip atau catatan-catatan, buku-buku termasuk pula kondisi geografis, demografi dan bentuk tulisan yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Data ini digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara (interview).

5. Teknik Analisis Data.

Tujuan dari analisa data pada dasarnya adalah untuk menyederhanakan data dalam bentuk yang mudah dipahami. Analisa data

ini dalam penelitian deskriptif kualitatif adalah induksi interpretatif yaitu usaha pengambilan keputusan berdasarkan dan perkiraan logis atas data perkiraan data yang diperoleh. Pendekatan interpretatif dalam ilmu sosial dimulai dengan pemahaman terhadap fakta-fakta atau data-data yang dikumpulkan melalui pemahaman intelektual yang dibangun berdasarkan empiris sensual dan empiris logik teori (Bryan Fay dalam Lexy J. Molcong, 2000 : 69-72).

Adapun langkah-langkah dalam proses penelitian deskriptif kualitatif adalah sebagai berikut :

- a. Membaca dan mempelajari data yang terkumpul sampai dikuasai sepenuhnya sambil memikirkan untuk mencari apakah ada pola-pola yang menarik.
- b. Melihat berbagai konsep yang timbul yang digunakan responden.
- c. Menerangkan sejumlah data dan metode untuk mengungkapkan karakteristik kategori data tertentu.
- d. Mencari hubungan antar konsep dalam usaha mengembangkan suatu teori.

Setelah melalui langkah-langkah tersebut, maka data yang telah diperoleh, dikumpulkan, disusun, diinterpretasikan untuk selanjutnya ditarik suatu